



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



2025

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan lancar. Perubahan Renja ini disusun sebagai tindak lanjut dari adanya dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun-tahun berikutnya.

Palu, 8 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah,



Yudiawati V. Windarrusliana, SKM., M.Kes.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670712 199003 2 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara telah diamanatkan oleh konstitusi. Hak setiap warga negara tersebut diikuti dengan ketentuan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, memberdayakan semua warga negara Indonesia untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan diharapkan dapat menjamin Ketersediaan Layanan Pendidikan, Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan, Meningkatkan Kualitas Dan Relevansi Pendidikan, Mewujudkan Kesenjangan Bagi Semua Warga Negara Dalam Layanan Pendidikan Dan Menjamin Kepastian Layanan Pendidikan.

Masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan untuk mencapai target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026. Permasalahan dan hambatan tersebut secara umum berkaitan dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, disusunlah dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang ***Transparan, Efektif, Efisien Dan Akuntabel*** dalam proses pelaksanaan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program- program serta kegiatan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Disatu sisi perencanaan juga merupakan suatu proses yang menghasilkan dokumen rencana. Dokumen Rencana kerja ini akan berfungsi sebagai peta untuk mencapai suatu tujuan dengan indikator pencapaian yang disepakati bersama oleh seluruh pihak. Proses menyusun rencana kerja merupakan usaha merencanakan langkah-langkah strategis dalam jangka menengah bagi setiap OPD.

Renja-OPD atau perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, yang disusun dengan berpedoman atau selaras dengan Renstra OPD yang tentu juga merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Sejalan dengan itu, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu unsur perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berkewajiban untuk menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan, melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di Kabupaten/Kota, dalam hal ini dengan mempertimbangkan masukan dan potensi- potensi kekuatan disetiap Renstra OPD Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dan partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya, Rencana Kerja (Renja) Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Program Tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah , serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, serta acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

RENJA-OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, disusun berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Pancasila sebagai landasan adil dan landasan operasional berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
8. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (berita negara republik indonesia tahun 2013 nomor 822);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah Periode 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor :486);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Dinas, Unit Pelaksana Badan dan Cabang Dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan II Tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2025, maka dalam periode ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan anggaran biaya sebesar : **Rp. 1.308.713.845.953,-**. (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Capaian untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut

Realisasi Program Kegiatan APBD Bulan Juni Triwulan II TA. 2025
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Jumlaha Anggaran	Realisasi Per 30 Juni			
		Keuangan		Fisik	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Urusan Pendidikan	1.308.713.845.953,65	443.470.927.756,00	33,89	463.399.313.608,00	35,41
Dinas Pendidikan Provinsi	1.306.312.478.242,65	442.801.387.354,00	33,90	462.550.197.923,00	35,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	970.165.881.585,65	360.168.515.331,00	37,12	361.033.086.247,00	37,21
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.783.003.517,00	191.331.850,00	5,06	453.155.050,00	11,98
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	977.561.550,00	173.000.000,00	17,70	308.392.000,00	31,55
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.648.450,00	9.998.450,00	48,42	12.998.450,00	62,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000.000,00	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	534.793.517,00	8.333.400,00	1,56	131.764.600,00	24,64

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	957.979.451.158,65	357.382.272.786,00	37,31	357.382.272.786,00	37,31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	957.979.451.158,65	357.382.272.786,00	37,31	357.382.272.786,00	37,31
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	221.152.050,00	73.583.000,00	33,27	77.913.000,00	35,23
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	221.152.050,00	73.583.000,00	33,27	77.913.000,00	35,23
Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.818.241,00	47.179.040,00	7,24	102.688.890,00	15,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287.846.941,00	-	-	37.000.000,00	12,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.971.300,00	47.179.040,00	12,96	65.688.890,00	18,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.230.708.419,00	2.434.071.656,00	33,66	2.906.897.595,00	40,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.230.708.419,00	2.434.071.656,00	33,66	2.906.897.595,00	40,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.748.200,00	40.076.999,00	13,37	110.158.926,00	36,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.628.200,00	40.076.999,00	15,86	108.489.442,00	42,94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.120.000,00	-	-	1.669.484,00	3,54

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	333.661.178.057,00	80.833.208.517,00	24,23	99.481.954.320,00	29,82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	162.762.122.150,00	44.000.512.500,00	27,03	62.113.428.652,00	38,16
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	230.914.750,00	17.874.074,00	7,74	19.394.074,00	8,40
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.171.519.000,00	-	-	-	-
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.150.614.950,00	-	-	-	-
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	433.319.300,00	23.181.032,00	5,35	76.731.272,00	17,71
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.786.183.250,00	38.024.000,00	2,13	38.424.000,00	2,15
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	153.964.809.000,00	43.635.153.270,00	28,34	61.550.688.956,00	39,98
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	782.275.200,00	245.703.424,00	31,41	387.613.650,00	49,55
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	155.690.665.215,00	31.000.917.800,00	19,91	31.633.314.848,00	20,32
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	51.470.934.115,00	2.676.803.560,00	5,20	1.289.003.560,00	2,50
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	127.059.200,00	15.515.000,00	12,21	17.935.000,00	14,12
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	34.834.000,00	32.445.280,00	93,14	32.445.280,00	93,14

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	122.935.500,00	15.215.000,00	12,38	20.795.000,00	16,92
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.186.914.900,00	-	-	-	-
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	358.168.000,00	10.882.180,00	3,04	135.650.630,00	37,87
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	179.237.150,00	-	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	390.791.050,00	2.700.000,00	0,69	-	-
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	79.025.150.000,00	28.021.131.580,00	35,46	30.000.215.838,00	37,96
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	258.212.000,00	92.878.960,00	35,97	-	-
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21.367.420.800,00	75.004.640,00	0,35	75.004.640,00	0,35
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	169.008.500,00	58.341.600,00	34,52	62.264.900,00	36,84
Pengelolaan Pendidikan Khusus	15.208.390.692,00	5.831.778.217,00	38,35	5.735.210.820,00	37,71
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.620.000,00	3.620.000,00	100,00	3.620.000,00	100,00

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	267.909.050,00	-	-	-	-
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	575.941.392,00	167.853.887,00	29,14	22.473.160,00	3,90
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	26.197.500,00	-	-	-	-
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	71.472.450,00	55.158.230,00	77,17	34.167.780,00	47,81
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	5.024.144.800,00	1.802.927.300,00	35,89	1.762.735.000,00	35,09
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.977.760.000,00	3.756.266.500,00	41,84	3.866.858.880,00	43,07
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	261.345.500,00	45.952.300,00	17,58	45.356.000,00	17,35
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.094.373.400,00	1.767.771.070,00	84,41	1.828.103.970,00	87,29
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2.094.373.400,00	1.767.771.070,00	84,41	1.828.103.970,00	87,29
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	2.094.373.400,00	1.767.771.070,00	84,41	1.828.103.970,00	87,29
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	391.045.200,00	31.892.436,00	8,16	207.053.386,00	52,95

Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	391.045.200,00	31.892.436,00	8,16	207.053.386,00	52,95
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	208.449.750,00	31.892.436,00	15,30	31.892.436,00	15,30
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	182.595.450,00	-	-	175.160.950,00	95,93
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	408.219.356,00	205.447.000,00	50,33	260.260.390,00	63,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	293.404.356,00	113.612.000,00	38,72	160.285.390,00	54,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.142.000,00	9.991.000,00	12,62	9.991.000,00	12,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.142.000,00	9.991.000,00	12,62	9.991.000,00	12,62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.262.356,00	103.621.000,00	48,36	150.294.390,00	70,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.262.356,00	103.621.000,00	48,36	150.294.390,00	70,15
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	114.815.000,00	91.835.000,00	79,99	99.975.000,00	87,07
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80.655.000,00	66.615.000,00	82,59	66.615.000,00	82,59

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	4.900.000,00	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8.640.000,00	-	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	67.115.000,00	61.715.000,00	91,95	61.715.000,00	91,95
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	34.160.000,00	25.220.000,00	73,83	33.360.000,00	97,66
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	4.900.000,00	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	8.640.000,00	-	-	8.140.000,00	94,21
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	20.620.000,00	20.320.000,00	98,55	20.320.000,00	98,55
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	325.655.580,00	55.043.590,00	16,90	56.782.590,00	17,44
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	249.501.580,00	55.043.590,00	22,06	56.782.590,00	22,76
Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.224.000,00	-	-	-	-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.224.000,00	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.277.580,00	55.043.590,00	32,14	56.782.590,00	33,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.277.580,00	55.043.590,00	32,14	56.782.590,00	33,15
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.154.000,00	-	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	51.607.700,00	-	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	51.607.700,00	-	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	24.546.300,00	-	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	24.546.300,00	-	-	-	-
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	353.363.229,00	91.059.160,00	25,77	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	217.652.529,00	76.509.160,00	35,15	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.993.950,00	624.100,00	1,11	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.993.950,00	624.100,00	1,11	-	-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.658.579,00	75.885.060,00	46,94	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.658.579,00	75.885.060,00	46,94	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	135.710.700,00	14.550.000,00	10,72	-	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	73.752.200,00	9.800.000,00	13,29	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	73.752.200,00	9.800.000,00	13,29	-	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	61.958.500,00	4.750.000,00	7,67	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	61.958.500,00	4.750.000,00	7,67	-	-
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	331.350.450,00	129.690.000,00	39,14	188.530.000,00	56,90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	224.018.350,00	79.890.000,00	35,66	122.623.200,00	54,74
Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.228.000,00	-	-	18.240.000,00	31,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.228.000,00	-	-	18.240.000,00	31,33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.790.350,00	79.890.000,00	48,19	104.383.200,00	62,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.790.350,00	79.890.000,00	48,19	104.383.200,00	62,96

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	107.332.100,00	49.800.000,00	46,40	65.906.800,00	61,40
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	72.903.900,00	30.600.000,00	41,97	32.588.600,00	44,70
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	72.903.900,00	30.600.000,00	41,97	32.588.600,00	44,70
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	34.428.200,00	19.200.000,00	55,77	33.318.200,00	96,78
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	34.428.200,00	19.200.000,00	55,77	33.318.200,00	96,78
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	319.531.420,00	53.322.250,00	16,69	101.590.420,00	31,79
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	264.484.970,00	53.322.250,00	20,16	101.590.420,00	38,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.926.650,00	-	-	5.358.650,00	33,65
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.926.650,00	-	-	5.358.650,00	33,65
Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.650.000,00	11.560.000,00	12,34	21.490.000,00	22,95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.650.000,00	11.560.000,00	12,34	21.490.000,00	22,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.908.320,00	41.762.250,00	26,96	74.741.770,00	48,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.908.320,00	41.762.250,00	26,96	74.741.770,00	48,25
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.046.450,00	-	-	-	-

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	44.416.500,00	-	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	44.416.500,00	-	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	10.629.950,00	-	-	-	-
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	10.629.950,00	-	-	-	-
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	373.003.380,00	111.102.998,00	29,79	119.751.998,00	32,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	299.007.980,00	94.317.398,00	31,54	102.079.598,00	34,14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.552.000,00	3.380.000,00	20,42	6.760.000,00	40,84
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.552.000,00	3.380.000,00	20,42	6.760.000,00	40,84
Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.184.000,00	9.474.600,00	12,28	13.856.800,00	17,95
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.184.000,00	9.474.600,00	12,28	13.856.800,00	17,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.271.980,00	81.462.798,00	39,69	81.462.798,00	39,69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.271.980,00	81.462.798,00	39,69	81.462.798,00	39,69
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	73.995.400,00	16.785.600,00	22,68	17.672.400,00	23,88

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50.793.800,00	8.592.800,00	16,92	9.479.600,00	18,66
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	50.793.800,00	8.592.800,00	16,92	9.479.600,00	18,66
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	23.201.600,00	8.192.800,00	35,31	8.192.800,00	35,31
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	23.201.600,00	8.192.800,00	35,31	8.192.800,00	35,31
UPTD Balai Layanan Platform Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	290.244.296,00	23.875.404,00	8,23	122.200.287,00	42,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	254.668.096,00	23.875.404,00	9,38	122.200.287,00	47,98
Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.372.450,00	-	-	58.372.450,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.372.450,00	-	-	58.372.450,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.333.646,00	7.050.000,00	10,47	29.872.356,00	44,36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.333.646,00	7.050.000,00	10,47	29.872.356,00	44,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.962.000,00	16.825.404,00	13,05	33.955.481,00	26,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.962.000,00	16.825.404,00	13,05	33.955.481,00	26,33
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	35.576.200,00	-	-	-	-

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	13.052.450,00	-	-	-	-
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	13.052.450,00	-	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	13.052.450,00	-	-	-	-
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	13.052.450,00	-	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Khusus	9.471.300,00	-	-	-	-
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	9.471.300,00	-	-	-	-

Berbagai Program dan kegiatan yang ditargetkan Kinerjanya di Tahun 2025, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, berdasarkan Misi pemerintah Daerah maka dituangkan pada Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Dengan tercapainya target kinerja sasaran tersebut, diharapkan akan mendorong akselerasi/percepatan terwujudnya visi dan misi pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya penjabaran rencana kerja tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2025, implementasi Rencana kerja Tahun 2025, Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2024			KONDISI AKHIR RPJMD (2026)
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3		5	6	7	8
1	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	14.38	0		15.28
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11.12			14.85
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA	APK SMA	86.5			88
			APM SMA	67.5			69
			Angka Kelulusan (AL) SMA	98.25			99
			Angka Putus Sekolah SMA	1.75			1
			Persentase SMA berakreditasi minimal B	45			60
			Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.75			70.5
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMK	APK SMK	86.5			88
			APM SMK	67.5			69
			Angka Kelulusan (AL) SMK	98.25			99
			Angka Putus Sekolah SMK	1.75			1
			Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	60.75			60
			Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.75			70.5

		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khusus	APM SLB/Paket C	66.75			66.5
			APK SLB/Paket C	74.75			75.5
			Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	19			22
		Meningkatnya Kualifikasi Dan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Persentase guru di SMA bersertifikasi	48.5			50
			Persentase guru di SMA berkualifikasi S1	48.5			50
			Persentase guru di SMA berkualifikasi S2	48.5			50
			Persentase guru di SMK bersertifikasi	48.5			50

			Persentase guru di SMK berkualifikasi S1	48.5			50
			Persentase guru di SMK berkualifikasi S2	48.5			50
			Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	48.5			50
			Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi	48.5			50
		Meningkatnya Jumlah Perizinan Pendidikan	Persentase perizinan SMA Swasta	60			75
			Persentase perizinan SMK Swasta	60			75
			Persentase perizinan SLB Swasta	60			75
			Persentase Bahasa Dan Sastra Daerah yang dilestarikan	45			60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) berimplementasi terhadap Perubahan ke – 2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait dengan UPT dan Cabang Dinas. Merujuk terhadap perubahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi. Menjelaskan :
Pada Bab III Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Pasal 3 ayat (2) Point d Sub Point (1) menjelaskan bahwa “ *DINAS PENDIDIKAN PROVINSI Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan*”
- 2) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Menjelaskan :

Pada Bab IV tentang Susunan Organisasi, Bagian Kedua tentang Dinas Pendidikan Pasal 6 ayat :

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pembinaan SMA;
- d. Bidang Pembinaan SMK;
- e. Bidang PKPLK dan Inovasi Pendidikan;
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. UPT Dinas;
- j. Cabang Dinas; dan
- k. Satuan Pendidikan Formal.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, Menjelaskan :

- Pada Bab II tentang Pembentukan

- a) Pasal 3 Poin (a). UPTD pada Dinas Pendidikan Provinsi, yakni UPTD. Balai Layanan Platform Teknologi Kelas B;
- b) Pasal 5 poin (a) Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi terdiri dari :
 1. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Satu (I) Kelas A Meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi berkedudukan di Kota Palu;
 2. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Dua (II) Kelas A Meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Mautong;
 3. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Tiga (III) Kelas A Meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan di Kabupaten Poso;
 4. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Empat (IV) Kelas A Meliputi Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan di Kabupaten Morowali;
 5. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Lima (V) Kelas A Meliputi Kabupaten Banggai Luwuk, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Kabupaten Banggai;

6. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Enam (VI) Kelas A Meliputi Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol yang berkedudukan di Kabupaten Toli Toli.
- 4). Pada Bab III tentang Susunan Organisasi, Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Pasal 6 :
- (1) Susunan Organisasi UPTD. Balai Layanan Platform Teknologi (UPTD BLPT) sebagai berikut :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5). Pada Bagian ketiga susunan Organisasi Cabang Dinas Paragraf I Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Pasal 26, Yakni :
- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan SMA;
 - d. Seksi Pembinaan SMK; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II sampai dengan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh ketersediaan SDM dan sarana prasarana serta pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana serta tidak

terciptanya koordinasi, dan sinkronisasi yang baik akan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja. Adapun isu-isu di bidang Pendidikan Adalah :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran masih minim/kurang diberdayakan oleh guru atau sekolah. Hal ini berdampak terhadap ketidak tahuan siswa mencari informasi dan atau bahan pembelajaran melalui fasilitas internet yang hanya semata informasi itu diperoleh dari buku teks pelajaran dan pemanfaatan perpustakaan. Serta menurunnya semangat kerja pendidik, karena sarana dan prasarana penunjang kurang memadai.
2. Pelaksanaan SPM, Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga bagi masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa serta standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
3. Pendidikan Vokasi, pendidikan vokasi merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan yang harus menjadi perhatian utama untuk pencapaian sasaran. Ada dua cara yang bisa ditempu, seperti yang dikemukakan saat mengungkapkan visi misinya dalam seleksi calon Kepala Dinas Pendidikan, yaitu pertama sasaran target, meningkatkan daya serap alumni di perguruan tinggi berkualitas, dan kedua pasar kerja. Dapat juga ditempuh dengan jalur regular dan khusus.
4. Dampak globalisasi dan masuknya sumber daya manusia berkualitas dari luar Sulawesi Tengah, sehingga sumberdaya manusia Sulawesi Tengah menjadi kalah dalam persaingan global di wilayah Sulawesi Tengah.
5. Angka melanjutkan lulusan SMA ke perguruan tinggi masih rendah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti Beasiswa yang ada belum merata dan belum menjangkau semua yang membutuhkan serta Biaya kuliah, akomodasi, dan

kebutuhan hidup mahasiswa seringkali tidak terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah.

6. Keterbatasan peralatan, rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang tidak serupa dengan dunia kerja pada Satuan Pendidikan Kejuruan (SMK) menyebabkan ketidaksiapan sebagian lulusan dalam memasuki dunia kerja. Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia kerja mempunyai efek domino terhadap industri pemakai, karena industri harus menyelenggarakan pendidikan di dalam industri untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Dengan demikian pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi terbaik bagi lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja dengan berbagai pelatihan kejuruan khusus yang berjangka pendek.
7. Semakin maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan peserta didik, serta tindak kejahatan lainnya yang melibatkan anak usia sekolah.
8. Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa dan mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah jatidiri bangsa (nasional).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pendidikan merupakan tolak ukur sebuah negara atau bangsa yang maju, pendidikan juga menjadi hal yang sangat fatal terkait kelangsungan sebuah negara dalam menyelesaikan berbagai problem kenegaraan baik di bidang ekonomi, budaya, kesehatan, agama dsb. Pendidikan merupakan sebuah alat utama demi tercapainya tujuan sebuah negara karena muara dari semua kebutuhan negara harus berdasarkan pengetahuan yang memadai. Di era milenial ini banyak hal penyimpangan merasuki anak – anak penerus generasi bangsa baik itu narkoba, pelecehan seksual, LGBT, karakter buruk dsb sangat sedikit sekali yang produktif.

Salah satu dampak dari belajar sekedar tau tapi tidak di praktekkan dalam kehidupan nyata. Warga negara Indonesia aktif sebagai konsumtif dari tren masa kini dari benua Eropa dan Amerika namun tidak produktif, Indonesia yang merupakan negara berkembang saat ini menjadi sorotan dunia dengan kekayaan alam yang melimpah dan populasi penduduk ke 4 dunia namun sumberdaya manusia yang lemah sehingga membuka ruang kepada perusahaan luar negeri untuk memasarkan barang di Indonesia. Pendidikan bermutu menjadi salah satu harapan bangsa Indonesia dalam penyeimbangan kemampuan skill secara internasional dan relevan dengan sumberdaya alamnya agar mampu mengolah sumberdaya alamnya sendiri.

Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah bersifat suigeneri dan seteril dari aneka pengaruh eksternal prosesnya dalam ranah dinamik yang rentan terhadap aneka pengaruh kepentingan politik dan birokratik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas lalu aspirasinya di pertimbangkan oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif, sehingga menjadi kebijakan publik pendidikan. Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dipublikasikan pada khalayak ramai kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan tolak ukur kebijakan pendidikan adalah terletak pada implementasinya. Implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusa

rumusan kebijakann pendidikan dapat berlaku dalam praktek. Baiknya suatu rumusan kebijakan jusru lebih lanjut dapat mendukung mudahnya implementasi kebijakan Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Rumusan kebijakan di buat berdasarkan misi yang ingin di capai suatu negara misi pendidikan di indonesia terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Misi jangka pendek melakukan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu, sudahkah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendidikan sesuai dengan asas desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah dan unuk merintis program-program pengayaan dan pengembangan ilmu pengeahuan dan teknologi.
2. Misi jangka menengah pendidikan nasional menciptakan sistem, iklim, proses, pendiddikan yang demokratis, dan mengutamakan mutu, mampu mengembangkan manusia dan kehidupan masyarakat indonesia yang cerrdas berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, sehat, disiplin, bertanggung jawab, tterampil dan menguasai ilmu pengetahuan serta tenologi, dan
3. Misi jangka panjang pendidikan nasioanal ialah melakukan pembudayaan dan pemberdayaan sisem, iklim dan proses pendidikan nasional yang demokratis dan mengutamakan muu dalam perspektif nasional dan global.

Kebijakan pendidikan nasional telah ditetapkan dengan tujuan yang mulia: meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih luas ke pendidikan menengah dan kejuruan. Namun, seperti dalam setiap implementasi kebijakan, tantangan- tantangan tak terhindarkan muncul. Untuk memperkenalkan implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dan analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia. Mulai dari kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas hingga kurangnya dukungan dari pihak terkait, termasuk kurangnya fasilitas,

infrastruktur, dukungan keuangan, hingga kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk memperbaiki implementasi kebijakan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia, peran pemerintah harus diperkuat, dan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan menjadi kunci keberhasilan. Untuk lebih jelasnya mari kita baca dengan seksama melalui tautan di bawah ini, kami berharap tulisan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam, menginspirasi perubahan, dan mendorong partisipasi aktif dari Anda dalam memajukan pendidikan kita.

Kompleksitas masalah yang ada di dalam dunia pendidikan nasional memang sangat menguras pikiran dan tenaga anak-anak bangsa yang memang sangat concern untuk memperbaiki kondisi pendidikan nasional ini dari waktu ke waktu.

Dalam perjalanannya hingga saat ini, pendidikan Indonesia belum mengalami perkembangan yang berarti dari waktu ke waktu, bahkan terkesan semakin berantakan. Padahal sudah banyak para pembuat kebijakan pendidikan di negara ini yang telah menghasilkan berbagai kebijakan mereka untuk kemajuan pendidikan Indonesia.

Begitupun dengan kurikulum pendidikan nasional di negara ini. Dapat dikatakan bahwa setiap pergantian menteri pendidikan, dipastikan ada pergantian kurikulum. Niat pergantian kurikulum tersebut sebenarnya memang bertujuan baik, yaitu untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tetapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Ketika sang menteri pendidikan telah berhenti dari masa jabatannya, maka berhenti pula program kurikulumnya, yang mana baru dijalankan setengah jalan, sehingga tidak terlihat hasil nyata dari penggunaan kurikulum tersebut.

Jika kita perhatikan secara umum, memang ada banyak faktor yang menjadi penghambat kemajuan pendidikan nasional kita, tetapi penulis hanya merinci tiga faktor utama saja, yang menurut penulis sangat krusial untuk segera diperbaiki, di antaranya adalah:

Salah satu unsur penghambat kemajuan pendidikan Indonesia adalah jiwa feodalisme yang belum bisa hilang dari jiwa dan sikap bangsa ini. Sistem pendidikan kita selama ini memang belum mampu untuk mengaktifkan daya nalar peserta didik atau siswa dalam mencari hikmah atau inti dari sebuah pengetahuan.

Siswa belum bisa mendapatkan rangsangan yang kuat dari sistem pendidikan nasional untuk menjadi pemikir-pemikir yang kritis terhadap sebuah permasalahan. Hal ini salah satunya juga disebabkan karena masih lemahnya kurikulum pembelajaran kita dalam penguasaan serta teknik penyelesaian masalah dengan menggunakan system Higher Order Thinking Skills (HOTS), sebuah turunan metode belajar yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom lewat teori "Taksonomi Bloom". Sedangkan, yang masih digunakan oleh sistem pendidikan nasional kita masih berupa Lower-Middle Order Thinking Skills (LEMOTS).

Belum lagi kendala sistemik dan struktural yang ada di pemerintahan itu sendiri, yang notabene tidak terlalu mementingkan pendidikan. Bahkan mungkin mengerti saja tidak tentang apa dan bagaimana mengelola pendidikan yang benar. Bahkan celaknya, terkadang urusan pendidikan masih dijadikan komoditas politik untuk meraup suara dukungan kepala daerah.

Majunya teknologi juga sangat berdampak kepada semua sendi kehidupan kita, termasuk pendidikan. Dengan demikian, tidak bisa dihindari dan dipungkiri, bahwasannya adaptasi dari kehidupan yang non teknologi menuju kehidupan yang berteknologi memerlukan sebuah jembatan.

Dalam dunia pendidikan, jembatan inilah yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional bangsa ini, agar pendidikan kita tidak gagap dan gugup dalam menghadapi perkembangan jaman yang serba cepat ini. Jembatan ini dapat berupa pengenalan teknologi untuk kemajuan pendidikan kepada seluruh stakeholder yang ada, seperti guru, siswa, orangtua siswa, dan masyarakat, sehingga ketika harus dilangsungkan kegiatan pembelajaran secara online, maka seluruh stakeholder tersebut akan menjadi terbiasa, dan tidak gagap.

Untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan mungkin sudah dapat menguasai teknologi informasi untuk pendidikan dengan cepat, dikarenakan infrastrukturnya yang sudah sangat memadai. Berbeda masalahnya dengan masyarakat yang masih tinggal di daerah pedesaan, dimana infrastruktur teknologi informasi belum maksimal, sehingga banyak kendala dalam penggunaannya. Pemerataan infrastruktur teknologi ini memang harus dilakukan dengan segera. Dan dengan dana anggaran yang ada untuk kemajuan pendidikan Indonesia, semoga hal ini bisa cepat terealisasi.

Apalagi dengan banyaknya jumlah guru-guru di negara ini yang masih gagap dengan kemajuan teknologi, menambah panjang rentetan masalah pendidikan kita. Slogan guru yang berupa pahlawan tanpa tanda jasa mungkin sudah harus diganti dengan guru adalah profesi dengan tanda terima. Ya, tanda terimakasih untuk guru memang harus diutamakan, alias diberikan gaji yang lebih layak dan layak lebih. Hal ini penting agar guru juga bisa meningkatkan kualitas diri mereka dalam pengenalan dan penggunaan teknologi untuk pendidikan, dan juga bisa terus belajar ke jenjang pendidikan yang paling tinggi, tanpa harus memikirkan kekurangan kebutuhan hidup mereka.

Faktor ketokohan memang tidak bisa serta merta ditinggalkan begitu saja di dalam memajukan pendidikan sebuah Negara. Indonesia sebenarnya adalah negara yang kaya dengan tokoh pendidikan baik yang bertaraf nasional dan internasional sekalipun, tetapi negara ini sepertinya masih miskin dengan penghargaan akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para tokoh pendidikan tersebut. Sehingga bangsa ini sepertinya menjadi bangsa yang miskin keteladanan.

Keteladanan inilah yang sulit kita temukan dari para tokoh-tokoh bangsa saat ini. Ketika mereka ada di dalam lingkungan pendidikan, mereka bisa menjadi seorang teladan bagi murid-murid mereka. Tetapi ketika mereka telah masuk dan berkecimpung di luar dunia pendidikan, apalagi jika sudah masuk ke dalam lingkup politik dan kekuasaan pemerintahan, maka idealisme mereka langsung menguap dikarenakan tidak tahan dengan godaan duniawi dan segala kemewahannya. Ilmu yang mereka miliki tiba-tiba menjadi mandul untuk diamalkan. Nurani kebenaran menjadi hilang, kalah dengan nurani kesempatan dan keuntungan. Lebih parahnya lagi, kebenaran mereka belokkan demi membela kepentingan kekuasaan.

Memang sepatutnya kebanggaan kita terhadap masa lalu yang pernah gemilang haruslah kita letakkan secara bijaksana di dalam kehidupan kita yang sekarang. Bangga dengan masa lalu boleh saja, tetapi ingat, kita sedang hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Keteladanan akan para tokoh bangsa di masa lalu, dan keteladanan akan para tokoh bangsa yang baik di masa sekarang memang sangat kita perlukan, agar bangsa ini dapat keluar dari segala macam masalah dan krisis di dalam dunia pendidikan nasional kita.

Dinas Pendidikan mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam periode yang lalu (2016-2020), Dinas Pendidikan telah mengimplementasikan Nawacita serta Kebijakan RPJMD dalam berbagai program kerja prioritas, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Memasuki periode selanjutnya (2021-2026), Dinas Pendidikan kembali mengelola sektor pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan.

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami

peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya.

Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, sesuai arahan Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuh kembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, serta kebijakan Kemendikbud, tentang Merdeka Belajar, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi

semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Selain berbagai potensi yang dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut harus diatasi dalam kurun waktu 2021-2026.

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan (APM), khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar. Namun, jika dilihat dari pemerataan akses masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya APK atau APM yang cukup lebar pada semua jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap siswa juga menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota.

Salah satu permasalahan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan erat dengan akses adalah banyaknya anak putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Salah satu penyebab terjadinya anak putus sekolah adalah kemiskinan. Kebijakan terobosan seperti penyediaan dana BOS dan beasiswa miskin secara massal telah terbukti dapat menurunkan angka putus sekolah tersebut.

Disparitas juga terjadi pada indikator pendidikan lainnya, seperti persentase guru SD berkualifikasi S-1/D-4. Disparitas berbagai indikator kinerja pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Sebab itu, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu dilaksanakan secara konsekuen.

Disparitas tersebut mungkin selama ini tidak disadari oleh pemerintah daerah karena dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya tidak pernah dicantumkan kewajiban pemerintah daerah dalam pencapaian target atau sasaran kinerja pembangunan pendidikan. Masih dalam aspek akses pendidikan, kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Hal ini berarti bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk kelompok termiskin masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk kelompok terkaya. Kebijakan pendanaan massal seperti BOS, beasiswa miskin, BKM, BOM telah terbukti dapat mengurangi disparitas partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya tersebut. Karena itu, kebijakan pendanaan massal perlu dilanjutkan di masa datang dengan mekanisme dan metode penyaluran yang lebih baik.

Disparitas dalam kesempatan memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan penduduk yang tinggal di perkotaan. Sebab itu, kebijakan terobosan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun terakhir perlu dilanjutkan dengan menitikberatkan pembangunan pada kabupaten dengan angka partisipasi pendidikan yang relatif masih rendah, dan dengan memperhatikan disparitas akses pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan hingga ke daerah terpencil.

Meski belum memiliki data akurat, diprediksi bahwa rasio Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada setiap jenjang pendidikan masih terdapat kesenjangan. Jadi, pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga perlu memperhatikan upaya pengurangan disparitas antargender.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya mutu pendidikan. Meski dalam berbagai olimpiade nasional beberapa peserta dari Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mengukir prestasi dengan meraih medali emas, perak, dan perunggu sebagai salah satu indikator mutu yang tinggi, tetapi secara global, mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih termasuk rendah. Pada level nasional, kualitas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi lain terutama provinsi yang ada di wilayah pulau Jawa.

Permasalahan pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian adalah mutu tenaga pendidik. Lemahnya sistem remunerasi bagi pendidik ditengarai berakibat terhadap mutu pendidikan karena mutu pendidikan sangat bergantung pada mutu pendidik. Selain itu banyak ditemukan kasus guru yang mengajar di luar bidang keahliannya (*mismatch*) karena keterbatasan jumlah guru khususnya di daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal. Karena itu, Pemerintah, sesuai dengan amanat

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengembangkan program sertifikasi guru. Program tersebut sekaligus menjawab tuntutan perbaikan remunerasi. Namun, dalam program sertifikasi tersebut belum ada kajian tentang korelasi peningkatan profesi guru dengan peningkatan mutu pendidikan yang dicirikan dari nilai UN.

Permasalahan lain dalam hal guru adalah disparitas distribusinya. Jika ditinjau secara keseluruhan rasio siswa/guru sudah sangat baik, tetapi disparitas antar kabupaten/kota masih cukup lebar, bahkan di daerah terpencil masih banyak satuan pendidikan khususnya SD yang hanya memiliki satu atau dua orang guru. Karena itu, penerapan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu lebih dipertegas dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang mendapat porsi anggaran terbesar dalam APBN dan APBD sesuai dengan tuntutan konstitusi. Dari tahun ke tahun, anggaran fungsi pendidikan dalam APBN meningkat secara nyata. Namun dengan dimasukkannya komponen gaji dalam ketentuan 20% tersebut berakibat pada menurunnya persentase anggaran pendidikan di banyak kabupaten/kota. Di beberapa daerah bahkan persentase gaji guru dan tunjangan lainnya saja sudah hampir mencapai 20% sehingga anggaran yang tersisa untuk kegiatan lain tidak tersedia.

Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan perkembangan kurikulum tersebut, antara lain dikenal Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2006, dan terakhir Kurikulum 2013. Pada masa lalu, kurikulum pendidikan syarat dengan materi tambahan yang tidak ada atau sangat sedikit kaitannya dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak. Meski kehadiran kurikulum 2013 telah mengakomodir hampir seluruh kekurangan dan kelemahan kurikulum sebelumnya, tetapi penerapannya di sekolah masih menuai banyak hambatan, terutama ditinjau dari aspek kompetensi guru untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dalam penciptaan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien belum optimal. Selain itu,

belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen tinggi untuk menyediakan anggaran pendidikan yang memadai. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan serta belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian

Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang merupakan representasi masyarakat perlu ditingkatkan. Diharapkan, dengan berlakunya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat memperjelas tugas, peran dan tanggung jawab setiap jenjang pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.

Salah satu permasalahan yang cukup kronis adalah ketersediaan data pada saat yang tepat. Tersedianya data yang akurat pada saat yang tepat merupakan syarat utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan. Namun, persoalan pendataan tersebut masih merupakan titik lemah dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian di masa datang. Keberadaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berperan cukup besar dalam membantu mengatasi permasalahan ini bagi kepentingan pembangunan pendidikan di daerah.

Implementasi sebuah kebijakan dengan tujuan yang sangat baik dapat berakibat kontra- produktif bila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang tepat. Kebijakan tentang program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru menjadi salah satu contoh nyata yang terjadi saat ini. Dengan harapan memperoleh kualifikasi akademik S1/D4 dan atau lolos sertifikasi untuk meningkatkan status sosial dan kesejahteraan, tidak sedikit guru yang lebih fokus pada aktivitas tersebut dengan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di sekolah. Permasalahan lain menyangkut kinerja guru adalah rendahnya komitmen guru dalam melaksanakan tugas profesi. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan upaya peningkatan mutu guru melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru tidak akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan pendidikan di daerah terpencil akan menjadi lebih sulit dengan tiadanya

pembangunan infrastruktur. Pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana prasarana pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan sarana transportasi dan telekomunikasi, di samping sarana pendukung lainnya. Demikian pula ketidakselarasan berbagai pembangunan bidang lain dengan pembangunan bidang pendidikan merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan pendidikan yang berkeadilan.

Rendahnya daya saing pendidikan antar wilayah kabupaten/kota juga perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan pendidikan ke depan. Keberadaan sekolah unggulan masih didominasi oleh daerah perkotaan, atau belum menyebar di beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka kecenderungan penumpukan siswa di daerah perkotaan akan semakin tinggi, yang akan berdampak pada semakin tingginya disparitas APK antar wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal tata kelola pendidikan, masih ada peluang bagi sebagian anggaran yang belum sepenuhnya dibelanjakan secara efektif dan efisien. Hal ini, antara lain karena masih adanya orientasi proyek pada sebagian pengelola pembangunan pendidikan. Anggapan bahwa penyerapan anggaran merupakan prestasi kerja masih melekat pada sebagian pengelola anggaran pembangunan pendidikan. Sementara itu, capaian indikator kinerja sebagai bukti keberhasilan pembangunan pendidikan belum menjadi tujuan utama. Karena itu, kualitas pemantauan dan evaluasi program dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga perlu ditingkatkan.

3.2. Program dan Kegiatan yang Mengalami Perubahan

Program pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan yang dihimpun dalam satu bentuk perencanaan berdasarkan potensi yang tersedia. Penetapan program dilakukan berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan yang diharapkan akan terwujud.

Adapun program/kegiatan yang mengalami perubahan antara lain:

1. Program Pembinaan SMA dan SMK: penyesuaian target sasaran peserta didik.
2. Program Peningkatan Kompetensi Guru: penambahan kegiatan diklat dan workshop.
3. Program Dukungan Operasional Sekolah (BOSDA): penyesuaian besaran alokasi anggaran.
4. Program Penguatan PKBM: penambahan bantuan hibah kelembagaan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH								709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65						1.977.979.402.046,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ndeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENDIDIKAN)				68 Indeks	68 Indeks	658.012.437.019,00	1.035.141.752.499,15	971.974.739.446,65	817.242.472.198,00							1.475.254.909.217,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan Penganggaran dan Evaluasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.787.518.337,00	5.141.935.337,00	3.783.003.517,00	-3.004.514.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Nilai SAKIP, SDM dan Penganggaran	3.095.946.456,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.346.213.400,00	1.596.135.400,00	977.561.550,00	-1.368.651.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		2.169.059.392,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	41.250.000,00	45.800.000,00	20.648.450,00	-20.601.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		37.012.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.500.055.000,00	2.650.000.000,00	2.250.000.000,00	-1.250.055.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		31.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	899.999.937,00	849.999.937,00	534.793.517,00	-365.206.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		858.374.564,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah				3 Dokumen	3 Dokumen	640.268.486.706,00	1.018.046.560.755,15	958.018.049.808,65	317.749.563.102,65			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah	1.458.844.791.366,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7944 Orang/ Bulan	7944 Orang/ Bulan	640.135.415.206,00	1.017.979.135.805,15	957.985.571.158,65	317.850.155.952,65	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		1.458.738.156.254,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				1 Dokumen	1 Dokumen	399.999.800,00	383.524.700,00	221.152.050,00	-178.847.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah	391.649.632,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	399.999.800,00	383.524.700,00	221.152.050,00	-178.847.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			391.649.632,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.702.835.140,00	2.203.828.931,00	1.152.612.641,00	-550.222.499,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		3.826.253.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.812.625,00	578.083.431,00	287.846.941,00	278.034.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			2.199.327.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	792.952.615,00	595.676.000,00	363.971.300,00	-428.981.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			682.499.490,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				28 Kegiatan	28 Kegiatan	8.558.890.636,00	8.839.017.826,00	8.371.211.230,00	-187.679.406,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		8.765.959.053,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	7.025.661.361,00	7.384.099.111,00	7.230.708.419,00	205.047.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			7.665.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				1 Dokumen	1 Dokumen	294.706.400,00	526.884.950,00	428.710.200,00	134.003.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		330.309.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	199.130.000,00	288.128.200,00	252.628.200,00	53.498.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			245.259.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	49.290.000,00	58.900.000,00	47.120.000,00	-2.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			58.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus				100 %	100 %	48.609.465.435,00	300.666.102.824,00	398.723.473.307,00	450.724.936.361,00							499.334.401.796,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Menengah atas				31 Sekolah	31 Sekolah	27.075.258.760,00	146.982.179.350,00	178.558.314.100,00	151.483.055.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM yang berdaya Saing Peningkatan SDM yang berdaya Saing	Satuan Pendidikan SMA yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		238.880.285.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	6 Unit	605.499.985,00	366.125.900,00	1.328.425.150,00	722.925.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM yang berdaya Saing Peningkatan SDM yang berdaya Saing			6.780.077.279,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	1.349.999.850,00	0,00	0,00	-1.349.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				186 Unit	186 Unit	500.305.200,00	1.171.519.000,00	1.171.519.000,00	671.213.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			72.782.332.238,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2596 Peserta didik	2596 Peserta didik	999.999.950,00	1.000.000.000,00	18.462.114.950,00	17.462.115.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			1.015.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				858 Peserta Didik	858 Peserta Didik	745.337.800,00	750.000.000,00	433.319.300,00	-312.018.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			826.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	2.000.000.000,00	1.936.299.850,00	1.786.183.250,00	-213.816.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			2.204.999.669,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				232 Satuan Pendidikan	232 Satuan Pendidikan	15.955.717.600,00	139.092.064.000,00	153.964.809.000,00	138.009.091.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			151.806.246.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB												
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)													
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.699.999.700,00	1.626.111.450,00	782.275.200,00	-917.724.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			1.799.999.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH												
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																							315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH						
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Unit	5 Unit	2.499.999.975,00	283.874.100,00	242.486.700,00	-2.257.513.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi					315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenajing Pendidikan Kejuruan				25 sekolah	25 sekolah	13.911.659.625,00	132.496.212.615,00	190.041.672.215,00	176.130.012.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMK yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provins		241.401.692.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH												
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																											148.953.477.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				33 Ruang	33 Ruang	489.882.175,00	51.470.934.115,00	51.470.934.115,00	50.981.051.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan					148.953.477.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																											1.524.172.141,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	86.754.000,00	139.587.200,00	127.059.200,00	40.305.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan					1.524.172.141,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																											1.001.105.621,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				17 Paket	17 Paket	200.061.050,00	252.428.000,00	34.834.000,00	-165.227.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi					1.001.105.621,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																													214.919.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	200.046.800,00	144.649.500,00	122.935.500,00	-77.111.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan					214.919.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH										
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																													213.359.947,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta didik	500 Peserta didik	1.049.999.950,00	1.049.999.850,00	16.498.704.900,00	15.448.704.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan					213.359.947,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				117 Peserta Didik	117 Peserta Didik	600.000.150,00	600.000.100,00	358.168.000,00	-241.832.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			523.232.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	349.004.000,00	179.237.150,00	-320.762.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			149.458.653,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				182 Satuan Pendidikan	182 Satuan Pendidikan	899.999.800,00	720.695.850,00	390.791.050,00	-509.208.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				181 Satuan Pendidikan	181 Satuan Pendidikan	8.044.282.400,00	75.616.486.000,00	79.025.150.000,00	70.980.867.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			82.878.959.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8 Dokumen	8 Dokumen	199.999.700,00	530.300.000,00	258.212.000,00	58.212.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	999.999.950,00	999.999.900,00	41.204.660.800,00	40.204.660.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			946.902.561,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	149.891.800,00	213.335.100,00	169.008.500,00	19.116.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			4.198.535.355,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Khusus				30 sekolah	30 sekolah	7.622.547.050,00	21.187.710.859,00	30.123.486.992,00	22.500.939.942,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SLB yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		19.052.423.741,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	30.150.100,00	7.440.000,00	3.620.000,00	-26.530.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			2.350.875.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	258.039.900,00	79.999.895,00	14.573.909.050,00	14.315.869.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			1.015.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				190 Peserta Didik	190 Peserta Didik	352.046.100,00	990.039.564,00	575.941.392,00	223.895.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			328.786.763,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				79 Orang	79 Orang	180.756.000,00	30.015.000,00	26.197.500,00	-154.558.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			151.322.483,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				192 Orang	192 Orang	416.952.350,00	139.372.300,00	71.472.450,00	-345.479.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			179.305.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	5.611.819.300,00	5.111.819.300,00	5.623.769.800,00	11.950.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			5.760.039.810,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	249.945.000,00	14.259.460.000,00	8.977.760.000,00	8.727.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			9.015.583.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	5 Dokumen	478.536.300,00	549.613.800,00	261.345.500,00	-217.190.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			225.260.595,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan khusus				100 %	100 %	2.365.416.800,00	2.227.083.700,00	2.094.373.400,00	100.000.000,00							2.465.416.800,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.365.416.800,00	2.227.083.700,00	2.094.373.400,00	-271.043.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		2.465.416.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.365.416.800,00	2.227.083.700,00	2.094.373.400,00	-271.043.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			2.465.416.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Perentase pemerataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan khusus				70 %	70 %	634.583.200,00	772.916.300,00	391.045.200,00	290.091.033,00							924.674.233,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Distribusi PTK				2 Dokumen	2 Dokumen	634.583.200,00	772.916.300,00	391.045.200,00	-243.538.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		924.674.233,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	277.117.650,00	398.463.450,00	208.449.750,00	-68.667.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			467.208.683,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	1 Laporan	357.465.550,00	374.452.850,00	182.595.450,00	-174.870.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			457.465.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65					1.977.979.402.046,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENDIDIKAN)				68 Indeks	68 Indeks	658.012.437.019,00	1.035.141.752.499,15	971.974.739.446,65	817.242.472.198,00							1.475.254.909.217,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan Administrtasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.702.835.140,00	2.203.828.931,00	1.152.612.641,00	-550.222.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		3.826.253.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	199.094.000,00	162.759.000,00	79.142.000,00	-119.952.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			273.443.625,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				28 Kegiatan	28 Kegiatan	8.558.890.636,00	8.839.017.826,00	8.371.211.230,00	-187.679.406,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		8.765.959.053,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	232.075.550,00	246.490.450,00	214.262.356,00	-17.813.194,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			10.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus				100 %	100 %	48.609.465.435,00	300.666.102.824,00	398.723.473.307,00	450.724.936.361,00							499.334.401.796,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Menengah atas				31 Sekolah	31 Sekolah	27.075.258.760,00	146.982.179.350,00	178.558.314.100,00	151.483.055.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMA yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		238.880.285.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	9.800.000,00	9.800.000,00	4.900.000,00	-4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			10.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				106 Orang	106 Orang	17.760.000,00	17.760.000,00	8.640.000,00	-9.120.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			20.967.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	117.190.000,00	132.360.000,00	67.115.000,00	-50.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenajng Pendidikan Kejuruan				25 sekolah	25 sekolah	13.911.659.625,00	132.496.212.615,00	190.041.672.215,00	176.130.012.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMK yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		241.401.692.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	9.800.000,00	9.800.000,00	4.900.000,00	-4.900.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			10.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	30 Orang	17.760.000,00	17.760.000,00	8.640.000,00	-9.120.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			20.967.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	35.520.000,00	42.270.000,00	20.620.000,00	-14.900.000,00	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			4.672.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II								709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65						1.977.979.402.046,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENDIDIKAN)				68 Indeks	68 Indeks	658.012.437.019,00	1.035.141.752.499,15	971.974.739.446,65	817.242.472.198,00							1.475.254.909.217,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.702.835.140,00	2.203.828.931,00	1.152.612.641,00	-550.222.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Organisasi Perangkat Daerah		3.826.253.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	173.948.000,00	160.838.000,00	78.224.000,00	-95.724.000,00	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				28 Kegiatan	28 Kegiatan	8.558.890.636,00	8.839.017.826,00	8.371.211.230,00	-187.679.406,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		8.765.959.053,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	261.314.250,00	271.724.300,00	171.277.580,00	-90.036.670,00	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		211.742.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus				100 %	100 %	48.609.465.435,00	300.666.102.824,00	398.723.473.307,00	450.724.936.361,00							499.334.401.796,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Menengah atas				31 Sekolah	31 Sekolah	27.075.258.760,00	146.982.179.350,00	178.558.314.100,00	151.483.055.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMA yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		238.880.285.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				44 Satuan Pendidikan	44 Satuan Pendidikan	92.925.300,00	95.625.250,00	51.607.700,00	-41.317.600,00	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			64.794.607,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenajng Pendidikan Kejuruan				25 sekolah	25 sekolah	13.911.659.625,00	132.496.212.615,00	190.041.672.215,00	176.130.012.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMK yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provins		241.401.692.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	46.265.300,00	46.265.300,00	24.546.300,00	-21.719.000,00	Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			64.138.777,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENDIDIKAN)				68 Indeks	68 Indeks	658.012.437.019,00	1.035.141.752.499,15	971.974.739.446,65	817.242.472.198,00							1.475.254.909.217,00		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tengah				3 Dokumen	3 Dokumen	640.268.486.706,00	1.018.046.560.755,15	958.018.049.808,65	317.749.563.102,65			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		1.458.844.791.366,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	71.611.100,00	0,00	0,00	-71.611.100,00	Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			39.666.112,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan Administrtasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.702.835.140,00	2.203.828.931,00	1.152.612.641,00	-550.222.499,00			-	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		3.826.253.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	51.685.900,00	116.259.500,00	55.993.950,00	4.308.050,00	Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			50.135.295,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				28 Kegiatan	28 Kegiatan	8.558.890.636,00	8.839.017.826,00	8.371.211.230,00	-187.679.406,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		8.765.959.053,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	188.600.950,00	186.800.825,00	161.658.579,00	-26.942.371,00	Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			182.450.677,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus				100 %	100 %	48.609.465.435,00	300.666.102.824,00	398.723.473.307,00	450.724.936.361,00							499.334.401.796,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Menengah atas				31 Sekolah	31 Sekolah	27.075.258.760,00	146.982.179.350,00	178.558.314.100,00	151.483.055.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMA yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		238.880.285.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	144.000.000,00	143.999.850,00	73.752.200,00	-70.247.800,00	Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			81.966.412,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenajang Pendidikan Kejuruan				25 sekolah	25 sekolah	13.911.659.625,00	132.496.212.615,00	190.041.672.215,00	176.130.012.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	n Reformasi Birokrasi Satuan Pendidikan SMK yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		241.401.692.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	119.999.700,00	61.958.500,00	-58.041.500,00	Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			83.694.345,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65					1.977.979.402.046,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	658.012.437.019,00	1.035.141.752.499,15	971.974.739.446,65	817.242.472.198,00							1.475.254.909.217,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.702.835.140,00	2.203.828.931,00	1.152.612.641,00	-550.222.499,00			-	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi	-		3.826.253.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	119.492.000,00	119.492.000,00	58.228.000,00	-61.264.000,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.558.890.636,00	8.839.017.826,00	8.371.211.230,00	-187.679.406,00			-	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi	-		8.765.959.053,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	190.866.900,00	190.866.900,00	165.790.350,00	-25.076.550,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus				100 %	100 %	48.609.465.435,00	300.666.102.824,00	398.723.473.307,00	450.724.936.361,00							499.334.401.796,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Menengah atas				31 Sekolah	31 Sekolah	27.075.258.760,00	146.982.179.350,00	178.558.314.100,00	151.483.055.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Satuan Pendidikan SMA yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		238.880.285.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajamen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	145.643.400,00	144.894.950,00	72.903.900,00	-72.739.500,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			66.736.425,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenajng Pendidikan Kejuruan				25 sekolah	25 sekolah	13.911.659.625,00	132.496.212.615,00	190.041.672.215,00	176.130.012.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMK yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		241.401.692.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajamen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	73.266.550,00	74.015.000,00	34.428.200,00	-38.838.350,00	Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			67.055.625,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENDIDIKAN)				68 Indeks	68 Indeks	658.012.437.019,00	1.035.141.752.499,15	971.974.739.446,65	817.242.472.198,00							1.475.254.909.217,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah				3 Dokum	3 Dokum	640.268.486.706,00	1.018.046.560.755,15	958.018.049.808,65	317.749.563.102,65			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		1.458.844.791.366,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	33.460.400,00	33.520.950,00	15.926.650,00	-17.533.750,00	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			38.308.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan Administarsi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.702.835.140,00	2.203.828.931,00	1.152.612.641,00	-550.222.499,00			Memperkuat refrasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		3.826.253.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	191.898.000,00	191.898.000,00	93.650.000,00	-98.248.000,00	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			127.764.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				28 Kegiatan	28 Kegiatan	8.558.890.636,00	8.839.017.826,00	8.371.211.230,00	-187.679.406,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		8.765.959.053,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	193.629.400,00	193.629.400,00	154.908.320,00	-38.721.080,00	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			188.110.172,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus				100 %	100 %	48.609.465.435,00	300.666.102.824,00	398.723.473.307,00	450.724.936.361,00							499.334.401.796,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Menengah atas				31 Sekolah	31 Sekolah	27.075.258.760,00	146.982.179.350,00	178.558.314.100,00	151.483.055.340,00			-	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMA yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		238.880.285.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	26.568.000,00	86.448.000,00	44.416.500,00	17.848.500,00	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			21.943.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	13.911.659.625,00	132.496.212.615,00	190.041.672.215,00	176.130.012.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMK yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		241.401.692.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	23.618.000,00	23.618.000,00	10.629.950,00	-12.988.050,00	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			21.943.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENDIDIKAN)				68 Indeks	68 Indeks	658.012.437.019,00	1.035.141.752.499,15	971.974.739.446,65	817.242.472.198,00							1.475.254.909.217,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				3 Dokumen	3 Dokumen	640.268.486.706,00	1.018.046.560.755,15	958.018.049.808,65	317.749.563.102,65			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		1.458.844.791.366,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	28.000.000,00	33.904.000,00	16.552.000,00	-11.448.000,00	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			28.660.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.702.835.140,00	2.203.828.931,00	1.152.612.641,00	-550.222.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		3.826.253.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	82.000.000,00	158.574.000,00	77.184.000,00	-4.816.000,00	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			85.583.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				28 Kegiatan	28 Kegiatan	8.558.890.636,00	8.839.017.826,00	8.371.211.230,00	-187.679.406,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		8.765.959.053,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	372.306.625,00	239.765.590,00	205.271.980,00	-167.034.645,00	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			230.866.044,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus				100 %	100 %	48.609.465.435,00	300.666.102.824,00	398.723.473.307,00	450.724.936.361,00							499.334.401.796,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Menengah atas				31 Sekolah	31 Sekolah	27.075.258.760,00	146.982.179.350,00	178.558.314.100,00	151.483.055.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMA yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		238.880.285.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	48.000.000,00	98.146.000,00	50.793.800,00	2.793.800,00	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGINAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			52.305.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenajng Pendidikan Kejuruan				25 sekolah	25 sekolah	13.911.659.625,00	132.496.212.615,00	190.041.672.215,00	176.130.012.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Satuan Pendidikan SMK yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		241.401.692.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	48.000.000,00	47.914.000,00	23.201.600,00	-24.798.400,00	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan			52.305.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
		UPTD BALAI LAYANAN PLATFORM TEKNOLOGI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65						1.977.979.402.046,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PENDIDIKAN)				68 Indeks	68 Indeks	658.012.437.019,00	1.035.141.752.499,15	971.974.739.446,65	817.242.472.198,00							1.475.254.909.217,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan Administrasi Umum Perkantoran lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.702.835.140,00	2.203.828.931,00	1.152.612.641,00	-550.222.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		3.826.253.710,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	120.249.000,00	58.372.450,00	58.372.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan			77.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1	NON URUSAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				28 Kegiatan	28 Kegiatan	8.558.890.636,00	8.839.017.826,00	8.371.211.230,00	-187.679.406,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		8.765.959.053,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	125.641.250,00	67.333.646,00	67.333.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan			77.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1	NON URUSAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65							1.977.979.402.046,00	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah				1 Dokumen	1 Dokumen	294.706.400,00	526.884.950,00	428.710.200,00	134.003.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		330.309.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	46.286.400,00	179.856.750,00	128.962.000,00	82.675.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan			26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus				100 %	100 %	48.609.465.435,00	300.666.102.824,00	398.723.473.307,00	450.724.936.361,00							499.334.401.796,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>persentase terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Menengah atas</i>				31 Sekolah	31 Sekolah	27.075.258.760,00	146.982.179.350,00	178.558.314.100,00	151.483.055.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi	Satuan Pendidikan SMA yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		238.880.285.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				117 Orang	117 Orang	116.512.000,00	27.151.000,00	13.052.450,00	-103.459.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			78.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenajng Pendidikan Kejuruan</i>				25 sekolah	25 sekolah	13.911.659.625,00	132.496.212.615,00	190.041.672.215,00	176.130.012.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi	Satuan Pendidikan SMK yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		241.401.692.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				117 Orang	117 Orang	116.512.000,00	27.151.000,00	13.052.450,00	-103.459.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	<i>Persentase terlaksananya pemenuhan SPM dan 8 SNP pada jenjang Pendidikan Khusus</i>				30 sekolah	30 sekolah	7.622.547.050,00	21.187.710.859,00	30.123.486.992,00	22.500.939.942,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi	Satuan Pendidikan SLB yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi		19.052.423.741,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>				30 Orang	30 Orang	44.302.000,00	19.951.000,00	9.471.300,00	-34.830.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi			26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
		J U M L A H							709.621.902.454,00	1.338.807.855.323,15	1.373.183.631.353,65	663.561.728.899,65						1.977.979.402.046,00		

BAB IV

PENUTUP

Demikian rencana kerja (Renja-OPD) Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah ini di susun sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang di rancang sebagai upaya untuk menawarkan program.

Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah secara detail diuraikan dalam Visi dan Misi organisasi Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, tujuan dan strategi yang akan dicapai serta implementasi pelaksanaan program dan berbagai tindak kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah dimaksud. Selanjutnya penyusunan Renja-OPD pada dasarnya sangat bermakna bagi Rencana Tindakan pelaksanaan tugas dan fungsi secara sistematis, transparan dan Akuntabel, terstruktur sehingga dapat mengevaluasi dan mengoreksi beban tugas dan fungsi yang belum maksimal. Disamping itu patokan kinerja yang diharapkan dengan mudah dapat diklasifikasikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan untuk masa akan datang.

Demikian dokumen ini dibuat, Insha Allah kami dapat melakukan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan.